Dari Bondi ke Papua: Genealogi Kekerasan Modern dan Dunia yang Menolak Mendengar

Published December 17, 2025 Uncategorized Leave a Comment

> *Gazelles like to die among their people.*
> *Falcons don't care where they die.*
>
> *— Ghassan Kanafani, Men in the Sun (hlm. 103)*

> *The bullet was the means of the physical subjugation.*
> *Language was the means of the spiritual subjugation.*
>
> *— Ngugi wa Thiong'o, Decolonising the Mind (hlm. 9)*

Di Pantai Bondi, Australia, kekerasan hadir kembali seperti selalu. Tanpa peringatan dan aba-aba. Dua pria bersenjata membuka tembakan secara mendadak ke arah kerumunan perayaan Hanukkah (hari besar kaum Yahudi), menciptakan kepanikan besar di antara warga dan pengunjung pantai. Pemimpin negara-negara Barat, beberapa di antaranya seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Prancis, dengan segera mengeluarkan pernyataan terbuka dan mengecam insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan, aksi terorisme, dan tindakan "anti-semitisme." Media pun (terutama Barat) menyusunnya sebagai cerita tunggal antara si "baik" dan "jahat." Ini menurutku adalah pereduksian yang banal, sebab setiap insiden—apalagi yang bentuk kekerasannya seperti ini, di mana targetnya adalah kelompok etnis tertentu (baca: Yahudi)—tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu memiliki dimensi dan silsilah, membawa jejak-jejak yang tak terselesaikan, perang yang dipindahkan (proksi), konflik yang diekspor, dan endapan ketidakadilan.

Sepanjang sejarah modern, kota memang kerap dianggap sebagai semacam ruang "netral", ruang sipil yang aman, rasional, dan terpisah dari konflik yang terjadi "di luar sana". Padahal, justru di kota-kota inilah menurutku kekerasan politik sering kembali, arena dengan gema sejarah yang sama (atau bahkan lebih besar, lebih eksplosif). Entah itu di Paris, London, Munich, atau Entebbe—semuanya memperlihatkan bagaimana konflik kolonial dan geopolitik yang disangkal akan mencari jalan masuk ke jantung kehidupan sehari-hari.

Kekerasan aparat Prancis terhadap demonstran Aljazair, tahun 1961

Di dekade 1950-an dan 1960-an, Paris mengalami serangan dari jaringan FLN (*Front de Libération Nationale*) Aljazair, lewat penembakan dan penyanderaan. Penyerangan tersebut dilakukan, bukan karena Paris dipenuhi orang-orang "kafir" atau "jahat", tetapi karena Aljazair sedang dijajah, dan keputusan Prancis untuk "memindahkan" perang kolonialnya ke jantung metropolis. Aljazair memang bukan koloni biasa; secara administratif ia dianggap bagian dari Prancis itu sendiri. Yang artinya, perang kolonial mereka sejak awal adalah perang yang *ambigu secara ontologis*: antara "dalam" dan "luar", antara republik dan imperium. Komunitas migran Aljazair yang lahir dan tumbuh besar di Prancis, selalu hidup dalam kondisi rasisme struktural, pengawasan polisi, dan kekerasan Negara. Prancis juga secara sistematis memindahkan teknik kontra-insurgensi kolonial ke dalam negeri melalui berbagai macam tindakan penyiksaan, penghilangan paksa, dan represi. Puncaknya terjadi saat *Pembantaian 17 Oktober 1961*, ketika polisi Paris membunuh puluhan—mungkin ratusan—demonstran Aljazair dan membuang mayat-mayat mereka ke Sungai Seine. Ini semua adalah konteks sosial-politik yang melatarbelakangi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan FLN di jantung kota Paris. Tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan adalah upaya untuk menghancurkan ilusi bahwa kolonialisme bisa berlangsung jauh dari mata publik metropolitan, sekaligus memaksa warga Prancis agar segera menyadari bahwa kenyamanan republik mereka dibangun di atas kekerasan imperium. Paris bukan korban yang "tak bersalah", tetapi ruang simbolik kekuasaan kolonial.

Dampak bom IRA di kota London tahun 1993

Beberapa dekade kemudian, kota London mengalami pola yang serupa, meski dalam konfigurasi yang berbeda. Bom-bom IRA (*Irish Republican Army*) yang meledak pada rentang tahun 1970–1990-an sering dibaca sebagai teror irasional terhadap warga sipil. Padahal, kekerasan itu berakar pada sejarah panjang kolonialisme internal di Irlandia Utara, di mana kaum minoritas Katolik hidup dalam diskriminasi politik, ekonomi, dan hukum. Konflik ini lama direduksi oleh negara Inggris sebagai masalah yang terisolir, gangguan sektarian yang bisa mudah ditangani dengan pasukan dan undang-undang darurat. Saat pada kenyataannya tidak. Dengan membawa bom ke London, IRA memindahkan konflik dari pinggiran ke pusat, dari Belfast ke London, ibu kota imperium Inggris. Pesannya sederhana sekaligus menohok: stabilitas Inggris (sebagai Negara dan imperium) dibangun di atas ketidakstabilan yang disengaja di Irlandia Utara. London menjadi target sebab ia melambangkan pusat kekuasaan imperium yang menolak mendengar bahasa politik selain kekerasan.

Kelompok September Hitam di Olimpiade Munich, tahun 1972

Munich, tahun 1972, menandai pergeseran lain yang lebih global. Olimpiade modern dibayangkan sebagai ritual perdamaian universal, ruang di mana politik ditangguhkan demi sportivitas dan kemanusiaan. Namun, ketika kelompok

September Hitam (Black September, yang terdiri dari orang-orang Palestina dan terbentuk dari puing Perang Sipil Yordania) datang menyerang asrama Israel dan menyandera atlet-atlet Israel, mereka merobek ilusi tersebut di depan kamera dunia. Aksi itu lahir dari kondisi Palestina yang secara sistematis dikeluarkan dari arena politik internasional: sebuah bangsa tanpa negara, tanpa paspor, dan tanpa forum diplomatik yang efektif. Mereka menuntut dibebaskannya 234 tawanan Palestina dari penjara Israel dan dua pemimpin kelompok Kiri di Jerman, Baader-Meinhoff. Dengan memilih panggung Olimpiade, kelompok September Hitam tidak hanya menyerang Israel, tetapi juga gagasan bahwa dunia bisa tetap netral terhadap kolonialisme pemukim (*settler colonialism*) dan penghapusan politik. Pembantaian di Munich bukan sekadar teror; ia adalah teriakan keputusasaan atas suara yang dibungkam (meski dengan harga moral yang menghancurkan dan trauma yang tak terhapuskan).

Era pembajakan pesawat oleh kelompok-kelompok Palestina pada 1960–1970-an, termasuk peristiwa Entebbe 1976 yang dilancarkan PFLP-EO (*Popular Front for the Liberation of Palestine–External Operations*), memperlihatkan logika yang sama dalam medium yang berbeda. Pesawat sipil internasional menjadi semacam ruang politik terapung yang terhubung ke semuanya. Udara menjadi satu-satunya ruang bagi kelompok yang tidak memiliki wilayah, kedutaan, atau kanal diplomasi resmi, di mana mereka bisa memaksa dunia berhenti dan mendengarkan. Entebbe mempertemukan konflik Palestina–Israel dengan geopolitik Perang Dingin dan Afrika pasca-kolonial, menjadikan sandera sebagai medium pesan global. Aksi terukur semacam ini tentu tidak lahir dari kekosongan ideologis. Ia lahir dari situasi di mana bahasa politik yang sah telah dipersempit, bahkan ditiadakan.

Pembajakan pesawat oleh PFLP-EO sebagai praksis

Jika ditarik sebagai satu garis sejarah, insiden-insiden ini menunjukkan pola yang konsisten. Ketika konflik kolonial atau geopolitik direduksi menjadi soal keamanan, ketika tuntutan politik dianggap tidak sah atau tidak layak dibicarakan, kekerasan akan kembali dalam bentuk yang lebih spektakuler dan (biasanya) destruktif. Kekerasan memilih ruang sipil karena ruang itu berfungsi sebagai simbol—tempat kehidupan "normal" berlangsung, di mana ilusi keamanan dan kenyamanan dipelihara. "Peristiwa" (Badiou) di ruang-ruang ini, maka, bukanlah kebalikan dari politik, tetapi politik yang justru dipaksa berbicara dengan bahasa paling vulgar.

Dalam bukunya *The Wretched of the Earth*, Frantz Fanon sempat menulis bahwa kekerasan kolonial menciptakan subjek yang terpecah, dan bahwa perlawanan sering kali mengambil bentuk yang paling brutal. Bukan karena perlawanan mensyaratkan tumpah darah, tetapi karena *kolonialisme sendiri adalah pedagogi kekerasan*. Mereka (baca: kolonialis/penjajah) mengajarkan, bahwasanya hanya kekuatan lah yang dihormati. Dunia hari ini, dengan Gaza yang diratakan dan diplomasi yang dilumpuhkan, sedang mengajarkan pelajaran yang sama.

> *At the level of individuals, violence is a cleansing force. It frees the native from his inferiority complex and from his despair and inaction; it makes him fearless and restores his self-respect.*
>
> *— Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (hlm. 94)*

Sejak Perang Dingin dimulai, kekuatan imperialis (Barat dan Timur) menyalurkan konflik melalui aktor lokal, milisi, dan negara-negara klien (alih-alih berperang secara frontal/langsung). Palestina adalah salah satu *medan perang proksi* terpanjang dalam sejarah modern, di mana kepentingan Amerika Serikat, Eropa, dan kompleks industri-militer global dipertahankan. Dalam konfigurasi ini, kekacauan maka menurutku bukan merupakan efek samping. Ia adalah produk yang memang sudah diantisipasi, atau bahkan diharapkan. Sebab, jika pembacaanku dulu terhadap teks Naomi Klein *The Shock Doctrine* tepat, maka kesimpulanku sekarang tetap sama: ketidakstabilan justru menciptakan kemungkinan lebih terhadap kontrol, bagi penjualan/cukong-cukong senjata (*arms dealer*), dan legitimasi kekuasaan yang mengatasnamakan keamanan.

Negara Israel, seperti semua Negara kolonial, mengandalkan kekerasan untuk menegakkan hukum kolonialnya. Tetapi ketika hukum itu sendiri tidak sah, kekerasan yang muncul sebagai penyangkalan terhadapnya tidak bisa dipahami dengan kategori moral biasa. Negara (*status quo*) akan selalu menyebutnya terorisme. Namun sejarah, jika ia jujur, mestinya harus menyebutnya sebagai gejala.

Apa yang terjadi sepanjang sejarah, hingga hari ini di Pantai Bondi, adalah kekerasan mimetik (Girard)—bagaimana masyarakat meniru kekerasan yang mereka kecam. Dunia Barat mengutuk kekerasan, sambil diam-diam mendanai pengeboman presisi yang terjadi di mana-mana. Mereka mengutuk serangan rakyat sipil, tetapi juga sambil memblokade air, listrik, dan akses terhadap bantuan kesehatan dan pangan bagi jutaan orang (seperti apa yang sedang terjadi di Palestina/Gaza). Dalam kontradiksi ini, kekerasan bukannya diredam, tetapi justru direplikasi.

Aku tidak percaya pada moralitas kolektif (Negara, atau institusi lain), sebab moralitas tersebut selalu datang terlambat dan selalu selektif. Moral tidak menghentikan bom napalm di Vietnam, tidak menghentikan kamp konsentrasi di Aljazair, tidak menghentikan Abu Ghraib, tidak menghentikan Sabra dan Shatila, dan tidak juga menghentikan genosida di Gaza hari ini. Sebab moral hampir selalu datang setelah peristiwa kekerasan terjadi (menilai yang terjadi sebagai hal yang “baik” atau “buruk”), bukan sebelum atau saat ia dapat dicegah. Moral lebih bekerja sebagai bahasa legitimasi dan penyesalan, bukan sebagai mekanisme penghenti. Maka persetan dengan moral. Apa yang terjadi sebelumnya justru relasi kekuasaan, dan kekerasan adalah bahasa yang digunakan otoritas ketika

relasi itu dibiarkan tanpa dikoreksi. Anti-Zionisme, dalam kerangka ini, maka seharusnya bukan kebencian terhadap suatu identitas, tetapi penolakan terhadap proyek kolonial yang gagal secara etis dan historis. Lagipula, bukankah setiap proyek kolonial pada akhirnya menciptakan kekerasan yang melampaui kendalinya sendiri? Prancis kalah di Aljazair, Inggris runtuh sebagai imperium, Afrika Selatan dipaksa meninggalkan apartheid. Tetapi sebelum runtuh, selalu ada fase keos—fase di mana kekerasan menjadi tak terlokalisasi, tak terprediksi, dan tak terkendali.

Manusia tidak pernah belajar. Negara (di mana manusia itu berpijak) pun tidak pernah. Setiap generasi boleh percaya bahwa kekerasan yang terjadi di generasinya berbeda, lebih "rasional," lebih terkontrol. Tetapi *setiap generasi lagi dan lagi keliru*. Selama imperialisme diberi nama keamanan, selama kolonialisme diberi nama pertahanan-diri (*self-defense*), selama perang proksi dianggap sebagai kebijakan luar negeri yang sah, maka kekerasan akan terus mencari bentuk-bentuk baru.

Apa yang terjadi di Bondi bukan pengecualian. Ia menurutku adalah pengulangan. Sebuah catatan kaki dalam sejarah panjang dunia yang menolak mendengar sebelum darah tumpah dan menyiratkan sesuatu yang didiamkan. Dan tumpahnya darah, seperti biasa, kurasa menyimpulkan hal yang sama: *tidak ada kekerasan yang lahir dari kehampaan, dan tidak ada kekuasaan yang kebal dari akibatnya.*

Bagaimana dengan kekerasan kolonial yang terjadi di Indonesia? Ya, itu pertanyaannya: *bagaimana dengan Indonesia?*

Indonesia jelas tidak berada di luar peta ini. Ia justru berada tepat di jantungnya, hanya saja kita terlalu lama menyebutnya dengan nama-nama bodoh seperti stabilitas nasional, keutuhan NKRI, atau urusan dalam negeri semata. Papua adalah contoh paling vulgar tentang bagaimana konflik kolonial—atau lebih tepatnya, konflik pasca-kolonial yang gagal diselesaikan—terus berdenyut di bawah permukaan ruang sipil Indonesia, menunggu momen atau ledakan untuk muncul sebagai "gangguan keamanan".

Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Fakfak, tahun 1969

Sedari awal, Papua tidak pernah benar-benar masuk ke Indonesia melalui proses politik yang setara. Integrasinya adalah hasil dari kalkulasi geopolitik Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan sekutunya lebih takut pada "Papua Merdeka yang condong ke Kiri" ketimbang pada pelanggaran prinsip Internasional atas penentuan nasib sendiri (*the right to self-determination*). Pepera 1969—yang secara resmi disebut *Act of Free Choice*—adalah peristiwa ironis dalam sejarah Indonesia, di mana 800 lebih wakil yang dipilih Negara (tentunya di bawah intimidasi militer Indonesia), memutuskan nasib jutaan orang. Sejak awal, Papua masuk sebagai wilayah yang ditundukkan, bukan sebagai subjek politik yang setara. Kekerasan yang menyusul setelahnya maka bukan kecelakaan sejarah, ia adalah konsekuensi dari fondasi integrasi itu sendiri.

> *They selected those people based on who they wanted, and they trained them in some Indonesian sentences, like 'I agree with Indonesia' or 'I want Indonesia, I don't want the Dutch' – at least 5 or 6 sentences. My father didn't know the meaning of these sentences. After some weeks, they tested who was doing good in those sentences and my father passed the test, and he was asked to say one of those whole sentences in a meeting. […] My father is now feeling very, very sorry. He is saying 'Don't repeat my mistake anymore.' At the time they thought Indonesia was coming to help, supporting independence.*
>
> *— OPM (anonimus), dikutip dari wawancara majalah Do or Die dengan perwakilan OPM di London (1999)*

Seperti Aljazair bagi Prancis atau Irlandia Utara bagi Inggris, Papua selalu diperlakukan sebagai wilayah yang "bermasalah," wilayah yang harus "diamankan" terlebih dahulu sebelum diajak berdialog. Bahasa politik Papua—tentang martabat, tanah, sejarah, tradisi, dan ingatan kolektif—sejak lama direduksi menjadi bahasa kriminil dan separatis. Setiap tuntutan dibaca sebagai ancaman, setiap simbol dianggap makar, setiap protes dibingkai sebagai pengganggu stabilitas. Negara (Indonesia) tidak pernah perlu mendengar, karena ia selalu merasa sudah benar sejak awal.

Militerisasi Papua sering dibenarkan sebagai "respons" atas kekerasan atau konflik yang terjadi di sana. Padahal, ia menurutku bukan respons, tetapi kondisi permanen yang justru melahirkannya. Operasi keamanan datang dan pergi, berganti nama dan rezim, tetapi strukturnya kulihat tetap sama: wilayah Papua yang diperlakukan sebagai *zona pengecualian hukum*. Pembunuhan di luar proses peradilan, pengungsian massal, pembungkaman media, dan rasisme terbuka terhadap orang Papua (dipanggil anjing, babi, monyet) bukanlah penyimpangan dari sistem, tetapi memang sudah cara kerja sistem itu sendiri. Negara mengajarkan—seperti kata Fanon—bahwa kekuatan (*power*) adalah satu-satunya bahasa yang sah. Maka tidak mengherankan jika bahasa itu kemudian ditiru, dipelintir, dan dikembalikan. Ketika kekerasan terjadi di Papua—penyerangan terhadap aparat, pembakaran fasilitas, atau aksi bersenjata (*armed resistance*) lainnya—respon publik Indonesia seringkali seragam, yaitu *keterkejutan moral yang selektif*. Kekerasan selalu dipotong dari sejarahnya, disajikan sebagai tindakan biadab yang muncul entah dari mana. Jarang sekali yang bertanya, kekerasan macam apa yang mendahuluinya? Kekerasan struktural macam apa yang telah didiamkan puluhan tahun tanpa kamera, tanpa *headline*, tanpa

kecaman internasional? Dalam keheningan itu, kekerasan Negara menjadi normal, sementara kekerasan perlawanan menjadi skandal.

Aktivis Papua Barat menyerukan slogan di Jakarta

Papua juga termasuk medan perang proksi, meski jarang diakui, bahkan oleh orang-orang di sekitarku yang mengaku dirinya Nasionalis. Kepentingan ekonomi global—tambang, nikel, emas, kayu—bersekongkol dengan kepentingan Negara untuk mempertahankan kedaulatan simbolik. Ketidakstabilan yang "terkendali" justru memungkinkan eksploitasi terus berlangsung dengan dalih keamanan. Naras-narasi kesejahteraan terus dijadikan sekadar kosmetik, bukannya melakukan koreksi struktural. Jalan dibangun, gedung didirikan, tetapi politik tetap dibekukan. Permukaan yang ditambal dari luka yang sama. Indonesia, seperti banyak Negara pasca-kolonial lain, mewarisi logika kolonial dan menggunakannya kembali atas nama "persatuan." Kita bisa saja menolak disebut penjajah, terus berada dalam fase mengelak (*denial*), tetapi faktanya, kita tetap menjalankan metode kolonialis yang sama melalui pengawasan, klasifikasi rasial implisit (rasisme), dan kekerasan yang dilegalkan terhadap warga Papua. Kita marah ketika dunia luar menyebut Papua sebagai koloni, bukan karena tuduhan itu sepenuhnya salah, melainkan karena ia terlalu dekat dengan kebenaran yang tak ingin kita akui.

> *They say you want the Indonesians out, but you will still have another government. Government is the same, whatever government it is, they do the same thing.*
>
> *— OPM (anonimus), dikutip dari wawancara majalah Do or Die dengan perwakilan OPM di London (1999)*

Maka pertanyaan "bagaimana dengan Indonesia?" yang kusematkan tadi kurasa bukan pertanyaan retoris. Ia berlaku sebagai cermin yang memaksa kita semua untuk melihat lebih dalam. Selama Papua terus diperlakukan sebagai masalah keamanan, bukan masalah politik dan sejarah; selama penderitaan dianggap harga wajar dari keutuhan Negara; selama kita percaya bahwa kekerasan Negara adalah pertahanan-diri, sementara kekerasan yang lahir darinya disebut teror—

maka kita sedang mengulang pola yang sama yang sedang kita kecam di tempat lain (seperti Palestina).

Papua bukan pengecualian Indonesia. Ia adalah gejalanya. Seperti di Bondi, Paris, London, atau Munich, kekerasan di Papua tidak lahir dari kehampaan. Ia lahir dari sejarah yang ditunda-tunda, dari politik yang dibekukan, dari relasi kuasa yang menolak dikoreksi. Seperti semua sejarah semacam itu, ia tidak akan diam selamanya dan akan terus mencari jalan untuk didengar—entah lewat bahasa, atau lewat darah.

Dan lucunya, ketika semuanya terjadi, manusia akan terus terkejut oleh apa yang mereka ciptakan sendiri, lalu menyebutnya sebagai *tragedi*, agar tidak perlu menyebutnya sebagai *kebenaran*.

> *People see what they want to see and what people want to see never has anything to do with the truth.*
>
> *— Roberto Bolaño, 2666 (hlm. 171)*

Le Syndicat Electronique – Aux Morts
The Basement

Watch on

0 Responses to “Dari Bondi ke Papua: Genealogi Kekerasan Modern dan Dunia yang Menolak Mendengar”

Leave a Comment

Leave a comment